

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN OBJEK WISATA PINUS PA'TENGKO KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

Riani Rudin¹, Helba Rundupadang^{2*}, Mince Batara³

Universitas Kristen Toraja, Sulawesi Selatan

e-mail: helba.rundupadang@gmail.com*

Abstract: *This descriptive qualitative research aims to analyze the financial management of BUMDes in managing the Pinus Pa'tengko Tourism Object, Mengkendek District, Tana Toraja Regency. The analysis covers five stages: planning, execution, record-keeping, reporting, and accountability. Data were collected through observation, documentation studies, and semi-structured interviews with the Head of Lembang, the BUMDes Chairman, and the Treasurer. The results show that during planning, budgeting is participatory involving the community and traditional leaders, although revenue targets rely on rough estimates without detailed expenditure drafts. In execution, business units for ticketing, parking, ATV rentals, and camping successfully create local employment, despite facing tourist fluctuations and high maintenance costs for non-permanent facilities. In record-keeping, administrative dualism was identified: the Chairman claims to use digital applications, whereas the Treasurer still relies on manual daily cashbook recording. The reporting stage is hindered by unpunctual unit managers, misplaced transaction receipts, and unclear field reports. In accountability, the Accountability Report (LPJ) is submitted annually to the Lembang Government alongside net profit distributions (35% employee salaries, 30% retained earnings, 20% BUMDes, and village income contribution). However, periodic in-depth evaluations remain passive and are tightened only when financial irregularities are indicated.*

Keyword: *Financial Management, BUMDes, Tourism Object, Pinus Pa'tengko.*

Abstrak: Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan menganalisis pengelolaan keuangan BUMDes dalam mengelola Objek Wisata Pinus Pa'tengko, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Analisis mencakup lima tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Data dihimpun melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur dengan Kepala Lembang, Ketua, serta Bendahara BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, proses penyusunan anggaran bersifat partisipatif melibatkan masyarakat dan tokoh adat, walaupun target pendapatan masih menggunakan estimasi kasar tanpa draf belanja rinci. Pada pelaksanaan, unit usaha tiket, parkir, rental ATV, dan perkemahan berhasil menyerap tenaga kerja lokal, meski menghadapi kendala fluktuasi wisatawan serta tingginya biaya perawatan fasilitas non-permanen. Pada tahap penatausahaan, ditemukan dualisme informasi administrasi di mana Ketua BUMDes mengklaim telah menggunakan aplikasi digital, sementara Bendahara masih melakukan pencatatan manual pada buku kas harian. Tahap pelaporan terkendala oleh ketidakdisiplinan waktu pengelola unit, nota transaksi yang sering hilang, dan laporan lapangan yang kurang jelas. Pada tahap pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diserahkan secara tahunan kepada Pemerintah Lembang beserta alokasi pembagian laba bersih (35% gaji karyawan, 30% laba ditahan, 20% BUMDes, dan PADes). Namun demikian, evaluasi mendalam berkala masih berjalan pasif dan baru diperketat jika terdapat indikasi ketidakberesan keuangan.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan, BUMDes, Objek Wisata, Pinus Pa'tengko

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata di Indonesia tumbuh dan berkembang semakin pesat melalui peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan destinasi wisata lokal. Penyelenggaraan pariwisata ini diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha melalui pembukaan lapangan kerja serta peluang usaha baru. Sebagai salah satu sektor yang dinamis dalam menangkap tren pembangunan global, pariwisata bersifat multidimensi—mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya—serta berpotensi besar dikembangkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Tana Toraja di Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang kaya akan potensi pariwisata berbasis keindahan alam, budaya khas, dan adat istiadat unik. Untuk mendukung pengembangan pariwisata dan meningkatkan penerimaan daerah seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, penerapan sistem retribusi dan pengelolaan keuangan menjadi kebutuhan krusial pada usaha industri pariwisata. Pengelolaan keuangan yang efektif dapat menunjang operasional, pemeliharaan fasilitas, promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keberlanjutan destinasi wisata.

Namun, dalam praktiknya, banyak objek wisata lokal dan desa wisata menghadapi kendala serius terkait tata kelola keuangan. Masalah yang sering terjadi mencakup belum adanya pencatatan keuangan yang tertib dan sistematis, minimnya pemahaman pengelola terhadap manajemen akuntansi sederhana, belum dipisahkannya keuangan pribadi dan usaha, serta rendahnya transparansi penggunaan dana pariwisata. Ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan ini terbukti merusak profitabilitas, memicu kebocoran pendapatan, serta menghambat daya tumbuh destinasi secara berkelanjutan.

Studi empiris terdahulu menunjukkan tantangan serupa pada

pengelolaan objek wisata skala lokal. Hasil penelitian Muhammad Dhio Natama Harahap, Muhammad Syukri Albani Nst, & Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan (2024) mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan objek wisata alam belum sepenuhnya transparan dan belum memiliki laporan keuangan yang terstruktur maupun perhitungan depresiasi aktiva tetap. Selain itu, Damayanty & Riharjo (2020) menegaskan bahwa mekanisme pertanggungjawaban keuangan objek wisata belum memenuhi dimensi akuntabilitas dan transparansi karena rendahnya penggunaan instrumen akuntansi serta pengungkapan yang kurang informatif.

Fenomena ketidakefektifan tata kelola keuangan tersebut juga ditemukan pada Objek Wisata Pinus Pa'tengko di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan observasi awal, pengelolaan keuangan di objek wisata ini masih menghadapi kendala teknis seperti pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual, belum adanya sistem pelaporan harian hingga bulanan yang terstruktur, ketidaksiplinan waktu penyerahan nota, serta belum adanya standar pembagian hasil yang jelas antarpihak. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan (*research gap*) antara prinsip ideal akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes dengan realitas praktik administrasi di lapangan.

Evaluasi terhadap tata kelola keuangan BUMDes dalam mengelola Objek Wisata Pinus Pa'tengko menjadi sangat urgent secara ilmiah maupun praktis. Secara praktis, pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel diperlukan untuk mencegah kebocoran kas, memastikan pemeliharaan fasilitas non-permanen berjalan rutin, serta menjamin bahwa hasil kegiatan wisata dapat didistribusikan secara adil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Lembang (PAL) dan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara ilmiah, kajian ini penting untuk memetakan dinamika penerapan

lima tahapan manajemen keuangan pada BUMDes berbasis kawasan adat.

Berdasarkan latar belakang dan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengelolaan keuangan BUMDes pada Objek Wisata Pinus Pa'tengko. Fokus analisis mencakup lima tahapan pengelolaan keuangan, yaitu perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*execution*), penatausahaan (*record-keeping*), pelaporan (*reporting*), dan pertanggungjawaban (*accountability*). Penelitian ini juga mengkaji proses operasional serta kendala teknis yang dihadapi pengelola dalam setiap tahapan tersebut.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penyediaan bukti empiris mengenai dinamika tata kelola keuangan BUMDes di destinasi wisata pedesaan. Artikel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan transisi administrasi dari pencatatan manual menuju digitalisasi, serta menawarkan formulasi pemecahan masalah praktis bagi pengelola BUMDes dan Pemerintah Lembang dalam merancang sistem akuntansi yang lebih akuntabel, transparan, dan terstruktur demi keberlanjutan ekonomi desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menganalisis praktik manajerial, tata kelola, dan kebijakan pengelolaan keuangan secara mendalam. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali makna, strategi, kendala operasional, serta realitas empiris terkait lima tahapan pengelolaan keuangan di lapangan, ketimbang sekadar menghitung nominal angka. Penelitian dilaksanakan di kawasan Objek Wisata Pinus Pa'tengko yang berlokasi di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Proses pengumpulan data lapangan berlangsung selama kurun waktu dua minggu, terhitung mulai

tanggal 18 Mei hingga 31 Mei 2026.

Subjek atau informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih pihak-pihak yang terlibat langsung, memahami, dan memiliki wewenang dalam tata kelola keuangan Objek Wisata Pinus Pa'tengko. Informan kunci terdiri dari tiga pihak utama, yaitu Ketua BUMDes Lembang Pa'tengko (Yan Darma T, S.T.) yang memegang kebijakan strategis, Bendahara BUMDes (Ribawana Paseru) yang bertanggung jawab atas teknis pencatatan dan rekapitulasi transaksi, serta Kepala Lembang Pa'tengko (Arianto Batara, S.E.) selaku pembina dan penerima pertanggungjawaban BUMDes.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang dibantu dengan pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan alat perekam. Indikator analisis difokuskan pada dua variabel utama, yaitu pengelolaan keuangan yang mencakup indikator perencanaan anggaran tahunan, realisasi anggaran, pengawasan keuangan, dan evaluasi hasil keuangan; serta variabel pendapatan objek wisata yang meliputi indikator penerimaan tiket masuk, sewa fasilitas, kerja sama, dan penjualan produk.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pencatatan transaksi kas harian, penggunaan instrumen keuangan, serta kondisi fisik fasilitas penunjang wisata. Wawancara semi-terstruktur dilakukan bersama para informan kunci guna mengeksplorasi mekanisme perencanaan anggaran, sistem pembukuan, alokasi bagi hasil, hingga kendala pelaporan.

Teknik analisis data menerapkan model kualitatif interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Sugiyono (2016), yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data mentah hasil wawancara dan observasi terlebih dahulu direduksi dengan cara memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan pada informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan pada Objek Wisata Pinus Pa'tengko yang dikelola oleh BUMDes Lembang Pa'tengko, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes, dan Kepala Lembang yang terlibat langsung dalam pengelolaan objek wisata. Analisis dilakukan berdasarkan lima fungsi utama

pengelolaan keuangan, yaitu perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*execution*), penatausahaan (*record-keeping*), pelaporan (*reporting*), dan pertanggungjawaban (*accountability*).

Berdasarkan data penerimaan objek wisata selama periode September–Desember 2023, jumlah pengunjung mengalami peningkatan dari 1.458 orang menjadi 3.757 orang. Peningkatan tersebut diikuti oleh kenaikan pendapatan retribusi tiket sehingga menunjukkan bahwa Objek Wisata Pinus Pa'tengko memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Lembang (PAL).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur sehingga masih ditemukan beberapa kelemahan dalam aspek administrasi, pelaporan, dan pengawasan.

Tabel 1 Ringkasan Hasil Analisis Pengelolaan Keuangan Objek Wisata Pinus Pa'tengko

Aspek Pengelolaan	Temuan Utama	Kondisi
Perencanaan (Planning)	Perencanaan dilakukan melalui musyawarah bersama pemerintah lembang, BUMDes, BPL, tokoh adat, dan masyarakat. Target pendapatan masih berdasarkan estimasi jumlah pengunjung dan belum menggunakan dokumen anggaran tahunan yang baku.	Belum Optimal
Pelaksanaan (Execution)	Pendapatan berasal dari tiket masuk, parkir, ATV, dan area camping. Dana dimanfaatkan untuk operasional, promosi digital, dan pemeliharaan fasilitas. Pendapatan masih fluktuatif mengikuti jumlah wisatawan.	Cukup Baik
Penatausahaan (Record-Keeping)	Pencatatan transaksi harian masih dilakukan secara manual meskipun telah direncanakan penggunaan aplikasi keuangan.	Belum Optimal
Pelaporan (Reporting)	Laporan keuangan disampaikan secara berkala kepada Pemerintah Lembang, namun masih terkendala keterlambatan laporan dan kelengkapan bukti transaksi.	Cukup Baik
Pertanggungjawaban (Accountability)	LPJ disampaikan setiap akhir tahun dan pembagian hasil telah mengikuti AD/ART BUMDes, namun evaluasi keuangan masih bersifat insidental.	Cukup Baik

Sumber: Data Primer Diolah (2026).

Pada aspek pelaksanaan, pengelolaan keuangan telah berjalan

sesuai dengan aktivitas operasional objek wisata. Pendapatan diperoleh dari

berbagai sumber, yaitu tiket masuk, parkir, penyewaan ATV, dan area camping. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung operasional, promosi melalui media sosial, serta pemeliharaan fasilitas wisata.

Selanjutnya, pada aspek penatausahaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi administrasi keuangan belum berjalan secara optimal. Meskipun pengurus BUMDes telah berupaya mengadopsi sistem pencatatan berbasis aplikasi, praktik di lapangan masih didominasi oleh pencatatan manual menggunakan buku kas.

Pada aspek pelaporan, seluruh unit usaha diwajibkan menyampaikan laporan pendapatan kepada bendahara sebelum disusun menjadi laporan keuangan BUMDes dan disampaikan kepada

Pemerintah Lembang. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip transparansi.

Pada aspek pertanggungjawaban, BUMDes telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan kepada Pemerintah Lembang setiap akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, pembagian laba telah dilaksanakan sesuai ketentuan AD/ART BUMDes yang mencakup alokasi bagi gaji karyawan, cadangan modal, pengembangan BUMDes, dana sosial, pengawas, penasehat, dan pelatihan secara preventif dan berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hasil analisis, dilakukan evaluasi terhadap setiap fungsi pengelolaan keuangan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Matriks Evaluasi Pengelolaan Keuangan Objek Wisata Pinus Pa'tengko

Fungsi Manajemen	Implementasi di Lapangan	Permasalahan	Rekomendasi
Planning	Musyawarah penyusunan anggaran melibatkan berbagai pihak	Belum terdapat RKAT khusus objek wisata	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
Execution	Operasional berjalan sesuai aktivitas wisata	Pendapatan tidak stabil dan biaya pemeliharaan tinggi	Diversifikasi sumber pendapatan dan efisiensi biaya operasional
Record-Keeping	Seluruh transaksi dicatat setiap hari	Sistem pencatatan masih manual	Implementasi sistem informasi akuntansi berbasis digital
Reporting	Laporan keuangan disusun secara periodik	Keterlambatan laporan dan dokumen belum lengkap	Penyusunan SOP pelaporan dan digitalisasi arsip
Accountability	LPJ disampaikan kepada Pemerintah Lembang	Evaluasi belum dilakukan secara berkala	Audit internal dan evaluasi rutin secara periodik

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Objek Wisata Pinus Pa'tengko pada dasarnya telah mengimplementasikan lima fungsi utama pengelolaan keuangan, yaitu perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*execution*), penatausahaan (*record-*

keeping), pelaporan (*reporting*), dan pertanggungjawaban (*accountability*). Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan manajerial yang berpengaruh terhadap kualitas tata kelola keuangan BUMDes. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan tidak

hanya ditentukan oleh tersedianya mekanisme pengelolaan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung akuntabilitas organisasi.

Pada tahap perencanaan (*planning*), proses penyusunan anggaran telah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Pemerintah Lembang, pengurus BUMDes, tokoh adat, Badan Permusyawaratan Lembang (BPL), dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan penerapan prinsip good governance, khususnya partisipasi dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2018). Meskipun demikian, penyusunan target pendapatan masih didasarkan pada estimasi jumlah kunjungan wisatawan tanpa didukung oleh analisis keuangan maupun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang sistematis. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengendalian anggaran karena organisasi belum memiliki indikator kinerja keuangan yang jelas sebagai dasar evaluasi.

Pada tahap pelaksanaan (*execution*), pengelolaan keuangan telah mampu mendukung operasional objek wisata melalui berbagai sumber penerimaan, seperti tiket masuk, parkir, penyewaan ATV, dan area camping. Pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk membiayai operasional, promosi, serta pemeliharaan fasilitas wisata. Selain memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Lembang (PAL), keberadaan objek wisata juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha baru. Namun demikian, tingginya ketergantungan terhadap jumlah kunjungan wisatawan menyebabkan pendapatan bersifat fluktuatif, sedangkan biaya pemeliharaan fasilitas tetap relatif tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelola perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan agar ketahanan keuangan organisasi tidak hanya bergantung pada

kunjungan wisatawan.

Permasalahan paling dominan ditemukan pada aspek penatausahaan (*record-keeping*). Penelitian menemukan adanya perbedaan informasi antara pengurus BUMDes dan bendahara terkait penggunaan aplikasi pencatatan keuangan. Direktur BUMDes menyatakan bahwa sistem pencatatan telah menggunakan aplikasi digital, sedangkan bendahara dan Pemerintah Lembang menegaskan bahwa pencatatan transaksi harian masih dilakukan secara manual. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa proses digitalisasi administrasi keuangan belum terimplementasi secara menyeluruh. Akibatnya, pencatatan transaksi masih berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, kehilangan dokumen, serta keterlambatan penyusunan laporan keuangan. Menurut Harahap et al. (2024), lemahnya sistem pencatatan dan belum terstandarisasinya pembukuan merupakan salah satu hambatan utama dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pada objek wisata berbasis desa.

Pada aspek pelaporan (*reporting*), penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan telah dilaksanakan secara periodik melalui penyampaian laporan dari setiap unit usaha kepada bendahara sebelum disusun menjadi laporan induk BUMDes. Meskipun demikian, pelaksanaan pelaporan masih menghadapi berbagai kendala administratif, seperti keterlambatan penyerahan laporan, nota transaksi yang hilang, serta pencatatan yang kurang lengkap. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan menjadi kurang efisien dan berpotensi menurunkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan.

Selanjutnya, pada aspek pertanggungjawaban (*accountability*), BUMDes telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pemerintah Lembang setiap akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas publik. Meskipun mekanisme formal telah berjalan sesuai ketentuan, sistem

pengawasan internal masih bersifat reaktif karena evaluasi mendalam baru dilakukan apabila terdapat indikasi penyimpangan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan Objek Wisata Pinus Pa'tengko telah memenuhi fungsi dasar pengelolaan keuangan, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek perencanaan berbasis anggaran, digitalisas

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus pengelolaan keuangan Objek Wisata Pinus Pa'tengko oleh BUMDes mencerminkan perpaduan antara partisipasi lokal yang inklusif dengan keterbatasan teknis-administrasi pada tingkatan operasional. Pada tahap perencanaan, perumusan anggaran telah menerapkan asas partisipatif dengan melibatkan Pemerintah Lembang, pengurus BUMDes, serta tokoh adat, meskipun target pendapatan masih berbasis estimasi kasar dan belum ditunjang draf belanja tahunan yang spesifik. Pada tahap pelaksanaan, diversifikasi pos penerimaan (tiket, parkir, ATV, dan *camping*) mampu memberikan dampak ekonomi bagi warga lokal, namun pengelola dihadapkan pada fluktuasi kunjungan musiman dan tingginya biaya pemeliharaan fasilitas non-permanen. Temuan krusial terlihat pada tahap penatausahaan dan pelaporan, di mana terjadi dualisme administrasi antara klaim penggunaan aplikasi digital oleh Direktur BUMDes dengan realitas pembukuan manual di tingkat Bendahara. Hal ini berdampak pada rendahnya kedisiplinan penyeteroran catatan harian, seringnya nota transaksi terselip atau hilang, serta keterlambatan penyusunan laporan induk. Adapun pada tahap pertanggungjawaban, BUMDes telah memenuhi akuntabilitas formal tahunan dan alokasi Pendapatan Asli Lembang (PAL), meski mekanisme evaluasi internal berkala masih bersifat pasif-

reaktif.

Temuan ini memberikan implikasi teoritis dan praktis yang signifikan dalam bidang manajemen keuangan publik pedesaan. Secara teoritis, hasil studi ini memperkuat literatur tata kelola BUMDes yang menegaskan bahwa keberhasilan partisipasi komunitas belum tentu berbanding lurus dengan efisiensi administrasi jika tidak diimbangi oleh kapasitas teknis akuntansi yang memadai. Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penetapan Standard Operating Procedure (SOP) pencatatan harian yang tegas, pengarsipan nota secara terstruktur, serta pengalihan sistem pengawasan Pemerintah Lembang dari pola pasif menjadi audit internal yang preventif dan berkala.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa pemetaan empiris mengenai kesenjangan (*gap*) transisi digitalisasi akuntansi pada entitas bisnis berbasis desa di wilayah adat. Hasil kajian ini melengkapi kerangka tata kelola BUMDes sektor pariwisata dengan menawarkan perspektif penyelarasan nilai sosial-komunal dan fleksibilitas manajerial dalam pengelolaan fasilitas non-permanen.

Sebagai saran untuk penelitian lanjutan, area yang masih perlu dieksplorasi mencakup formulasi model evaluasi kinerja keuangan BUMDes berbasis aplikasi digital yang ramah bagi sumber daya manusia di pedesaan. Selain itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengkaji secara kuantitatif dampak efisiensi alokasi biaya pemeliharaan fasilitas terhadap tingkat profitabilitas jangka panjang pada objek wisata alam sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananto, A. (2018). Daya tarik wisata dan pengembangannya. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 5(2), 45–57.
- Damayanty, D. N., & Riharjo, I. B. (2020). Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan

- keuangan objek wana wisata Coban Parang Tejo Malang. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 77–86.
- Elvariyan. (2021). *Pengelolaan keuangan objek wisata Ammani (Tinjauan manajemen keuangan syariah)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare].
- Firanti, F. (2024). *Analisis pengelolaan keuangan objek wisata Danau Panjang di Desa Istana Kecamatan Sandai* [Skripsi, Universitas OSO].
- Handoko, T. H. (2011). *Manajemen* (2nd ed.). BPFE.
- Hardianto, A., & Srimindarti, C. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes dalam pengoperasian unit wisata desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 4(2), 115–128.
- Harahap, M. D. N., Albani, M. S., & Hasibuan, N. F. A. (2024). Analisis pengelolaan keuangan pada industri pariwisata di Sumatera Utara. *MASMAN: Master Manajemen*, 2(4), 52–70.
- Mustangin, M., & Rani, M. (2020). Evaluasi pengelolaan keuangan pada pengelola wisata alam. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 3(2), 113–127.
- Prakoso, A. (2015). *Pembangunan pariwisata Indonesia dalam perspektif multidimensi*. Bumi Aksara.
- Puspawijaya, A., & Nuritha, F. (2019). Analisis tahapan pengelolaan keuangan pada organisasi pariwisata. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 10(2), 101–109.
- Raharjo, S., & Fitriani, A. (2022). Dualisme pencatatan keuangan (manual dan digital) pada lembaga keuangan mikro desa: Tantangan tata kelola era transisi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 18(2), 201–214.
- Sadisaputro, G., & Anggarini, Y. (2021). *Anggaran bisnis: Analisis, perencanaan, dan pengendalian laba* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- Sari, I. P., & Setiawan, H. (2021). Pengaruh siklus kunjungan wisatawan musiman terhadap stabilitas pendapatan dan pengeluaran pemeliharaan fasilitas wisata alam. *Jurnal Manajemen Kepariwisata*, 15(1), 33–46.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Talan, M. (2022). Manajemen keuangan pada industri pariwisata: Analisis efisiensi pengelolaan dana. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 40.
- Terry, G. R. (2012). *Prinsip-prinsip manajemen*. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2004). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Utami, T. B., & Wijaya, A. (2023). Analisis kendala administrasi pelaporan keuangan unit usaha mikro desa: Masalah disiplin waktu dan dokumen transaksi. *Jurnal Tata Kelola Akuntansi*, 8(2), 112–125.
- Wulandari, S., & Saputra, M. Y. (2021). Peran pemerintah desa dalam pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 7(3), 198–202.
- Zebula, R. (2016). Potensi pariwisata dalam pengembangan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 4(2), 67–76.
- Damayanty, P., & Riharjo, I. B. (2020). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada objek wisata Coban Parang Tejo Malang*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Harahap, M. D. N., Nst, M. S. A., & Hasibuan, N. F. A. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan pada Objek Wisata Alam di Kabupaten Mandailing.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.